



**RENCANA STRATEGIS BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA**  
**SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN 2025 - 2029**





BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR **53** TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 003 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

8. Peraturan....

8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahunan.
9. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita / capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
10. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
11. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan / atau memperhatikan sasaran RPJMD.
12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan.

13. Strategi...

13. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, lokus dan penentuan program / kegiatan /sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
18. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
19. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan.
  - Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan.

Lampiran III...

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran III    | : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.                                                          |
| Lampiran IV     | : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.                                         |
| Lampiran V      | : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.                                                                       |
| Lampiran VI     | : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.                                                              |
| Lampiran VII    | : Renstra Dinas Sosial.                                                                                     |
| Lampiran VIII   | : Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.                                                              |
| Lampiran IX     | : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. |
| Lampiran X      | : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.                                                          |
| Lampiran XI     | : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.                                                           |
| Lampiran XII    | : Renstra Dinas Perhubungan.                                                                                |
| Lampiran XIII   | : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.                                          |
| Lampiran XIV    | : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.                          |
| Lampiran XV     | : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.                                           |
| Lampiran XVI    | : Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga.                                                                    |
| Lampiran XVII   | : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.                                                                  |
| Lampiran XVIII  | : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.                                                                 |
| Lampiran XIX    | : Renstra Dinas Perikanan.                                                                                  |
| Lampiran XX     | : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.                                                             |
| Lampiran XXI    | : Renstra Dinas Peternakan.                                                                                 |
| Lampiran XXII   | : Renstra Sekretariat Daerah.                                                                               |
| Lampiran XXII.1 | : Renstra Bagian Umum.                                                                                      |
| Lampiran XXII.2 | : Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.                                                     |
| Lampiran XXII.3 | : Renstra Bagian Hukum.                                                                                     |
| Lampiran XXII.4 | : Renstra Bagian Organisasi.                                                                                |
| Lampiran XXII.5 | : Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.                                                 |
| Lampiran XXII.6 | : Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa.                                                                     |
| Lampiran XXIII  | : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.                                                       |
| Lampiran XXIV   | : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.                                         |
| Lampiran XXV    | : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.                                                                   |
| Lampiran XXVI   | : Renstra Badan Pendapatan Daerah.                                                                          |
| Lampiran XXVII  | : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.                                    |
| Lampiran XXVIII | : Renstra Inspektorat.                                                                                      |
| Lampiran XXIX   | : Renstra Kecamatan Lobalain.                                                                               |

Lampiran XXX...

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Lampiran XXX     | : Renstra Kecamatan Rote Barat Laut.        |
| Lampiran XXXI    | : Renstra Kecamatan Rote Barat Daya.        |
| Lampiran XXXII   | : Renstra Kecamatan Rote Barat.             |
| Lampiran XXXIII  | : Renstra Kecamatan Rote Selatan.           |
| Lampiran XXXIV   | : Renstra Kecamatan Rote Tengah.            |
| Lampiran XXXV    | : Renstra Kecamatan Pantai Baru.            |
| Lampiran XXXVI   | : Renstra Kecamatan Rote Timur.             |
| Lampiran XXXVII  | : Renstra Kecamatan Ndao Nuse.              |
| Lampiran XXXVIII | : Renstra Kecamatan Landu Leko.             |
| Lampiran XXXIX   | : Renstra Kecamatan Loaholu.                |
| Lampiran XL      | : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

- (5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 26 September 2025



BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK

| Paraf Hierarki                            |   |
|-------------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah                         | T |
| Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | g |
| Kepala Bagian Hukum                       | p |

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 26 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAT MATHEOS SELLY

| Paraf Hierarki                            |   |
|-------------------------------------------|---|
| Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | g |
| Kepala Bapelitbangda                      | g |
| Kepala Bagian Hukum                       | p |

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 053



## **LAMPIRAN XXII.6**

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa atas rahmat-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategi (Renstra) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan. Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah periode 2025-2029 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kami mengharapkan Renstraini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan demikian diharapkan Rencana Strategi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah ini dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Rote Ndao pada Umumnya Khususnya Bidang Urusan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai TUPOKSI.

Ba'a, 26 September 2025

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Setda Kab Rote Ndao,



**Joni A. Adu, ST**  
Pembina  
NIP. 19840615 201001 1 023

DAFTAR ISI

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman                                                                                      |     |
| LAMPIRAN PERBUP .....                                                                        | i   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                         | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                             | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                           | xi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                          | xii |
| <br>                                                                                         |     |
| BAB I     PENDAHULUAN .....                                                                  | 1   |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                  | 1   |
| 1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....                                                          | 2   |
| 1.3    Maksud dan Tujuan Penyusunan .....                                                    | 4   |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                                           | 5   |
| <br>                                                                                         |     |
| BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAERAH.....        | 8   |
| 2.1    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                             | 8   |
| 2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....                                 | 8   |
| 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                     | 11  |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                | 14  |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                                                         | 19  |
| 2.1.5 Mitra Kerja Sama .....                                                                 | 19  |
| 2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                 | 19  |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....                                           | 19  |
| 2.2.2 Isu Strategis .....                                                                    | 20  |
| <br>                                                                                         |     |
| BAB III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                 | 21  |
| 3.1    Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....                                                 | 21  |
| 3.2    Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....                                                | 21  |
| 3.3    Strategi .....                                                                        | 23  |
| 3.4    Penahapan Pembangunan .....                                                           | 24  |
| 3.5    Arah Kebijakan .....                                                                  | 24  |
| <br>                                                                                         |     |
| BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN<br>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... | 26  |
| 4.1    Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 .....                                               | 26  |
| 4.2    Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....                                   | 30  |
| 4.3    Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan<br>Daerah .....       | 37  |
| 4.4    Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                                                   | 37  |
| 4.5    Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....                                                   | 38  |
| <br>                                                                                         |     |
| BAB V     PENUTUP .....                                                                      | 40  |

DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                       | Halaman |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 | Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....      | 12      |
| Tabel 2.2 | Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024..... | 12      |
| Tabel 2.3 | Jumlah pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kab. Rote Ndao .....                                     | 13      |
| Tabel 2.4 | Keadaan Sarana Prasarana Kantor pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa .....                                                                               | 14      |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 .....                                                  | 15      |
| Tabel 2.6 | Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2020 - 2024 .....                                                 | 18      |
| Tabel 2.7 | Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis.....                                                                                              | 20      |
| Tabel 3.1 | Perumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029.....                        | 22      |
| Tabel 3.2 | Strategi Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029.....                                                                     | 24      |
| Tabel 3.3 | Penahapan Renstra Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2026-2030.....                                                                   | 24      |
| Tabel 3.4 | Arah Kebijakan Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 .....                                                   | 25      |
| Tabel 4.1 | Cascading Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2029.....                                                       | 27      |
| Tabel 4.2 | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao .....                         | 31      |
| Tabel 4.3 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah .....                                                                     | 37      |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao.....                                                                  | 38      |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao.....                                                                  | 39      |

DAFTAR GAMBAR

|            | Halaman                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 1.1 | Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ..... 2                                                                            |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa ..... 11                                                                     |
| Gambar 3.1 | Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Bagian<br>Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao ..... 23           |
| Gambar 4.1 | Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra<br>Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao ..... 26 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

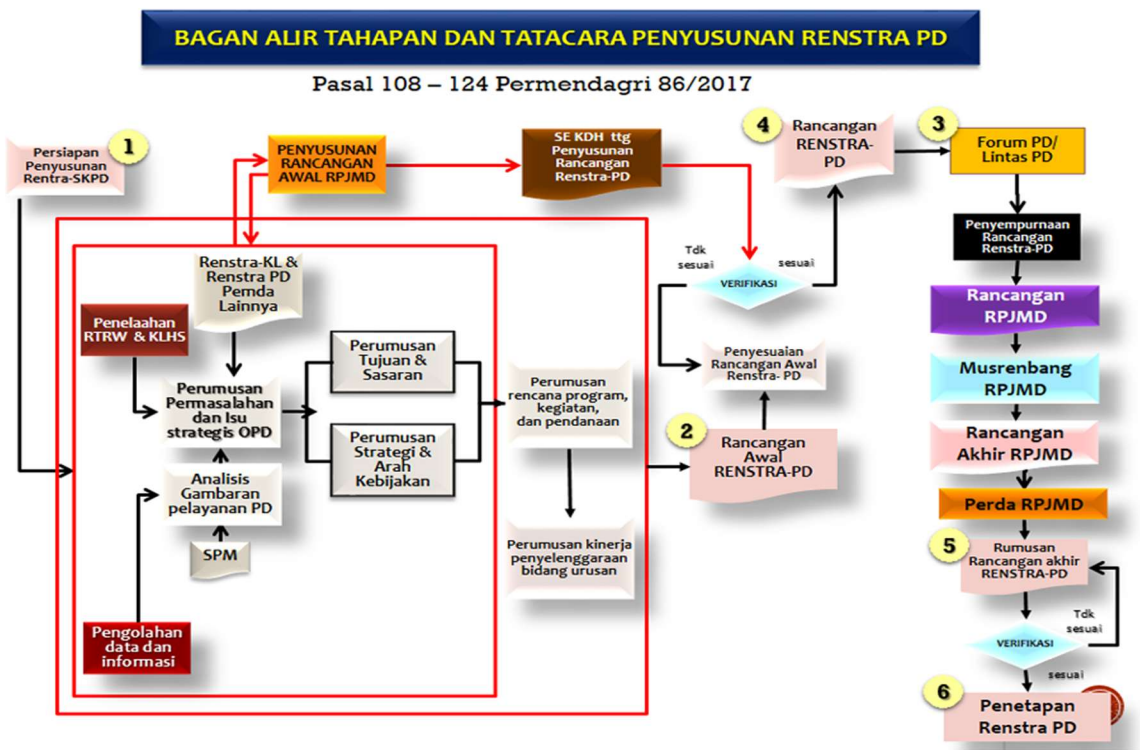
Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk masa waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Renstra Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rote Ndao selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTRW, KLHS dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Selain itu, Renstra Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-

- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 003);
  19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 031);
  20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 001);
  21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah dan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 052).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bagian Pengadaan Barang/ Jasa selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Renstra Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao.

- b. Sebagai pedoman bagi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- c. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu lima tahun dan sekaligus mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

###### **1.1 Latar belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

###### **1.2 Dasar hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

###### **1.3 Maksud dan tujuan:**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

###### **1.4 Sistematika penulisan:**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

###### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

###### **2.1.1. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

###### **2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Memuat sasaran layanan perangkat daerah

#### 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk pencapaian kinerja

### 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

#### 2.2.2 Isu strategis.

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2029.

## **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang perumusan tujuan Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

### 3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang perumusan tujuan Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah

Memuat tentang strategi yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Memuat tentang arah kebijakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

### 4.1 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029

Kerangka penyusunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

### 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Memuat tentang rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan Tahun 2025-2029

### 4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Pendukung Program Prioritas Pembangunan.

Memuat tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

#### 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2025-2029.

#### 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

#### 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, ditetapkan bahwa “Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Operasional Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, ditetapkan bahwa “Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

##### a. Kepala Bagian

Kepala Bagian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Merumuskan dan Menetapkan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang/ Jasa lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Merumuskan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengadaan Barang / Jasa;
5. Mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dan segala bentuk laporan di Bidang Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digukan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

6. Mengoordinir pengelolaan sistem pengadaan dan informasi manajemen pengadaan barang dan jasa;
7. Memfasilitasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dalam hal pemilihan penyedia barang dan jasa;
8. Mengoordinir pelaksanaan pelayanan pengadaan barang / jasa;
9. Melaksanakan pembentukan, pembekalan, penempatan dan pemindahan kelompok kerja;
10. Melaksanakan pendamping, bimbingan teknis, pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang / jasa;
11. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang / jasa;
12. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan meliputi pengelolaan pengadaan barang / jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang / jasa;
13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah;
15. Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bagian berdasarkan rencana kerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

**b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa**

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, melaksanakan dan menginventarisir paket pengadaan barang/jasa, memberi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta mengoordinir, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Pengadaaan Barang/Jasa, berdasarkan rencana operasional Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;

3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, mengoordinir, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, berdasarkan rencana operasional Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang / jasa dan infrastrukturnya;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**d. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa**

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pembinaan, pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis Sumber Daya dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, memberi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta mengoordinir, mengevaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

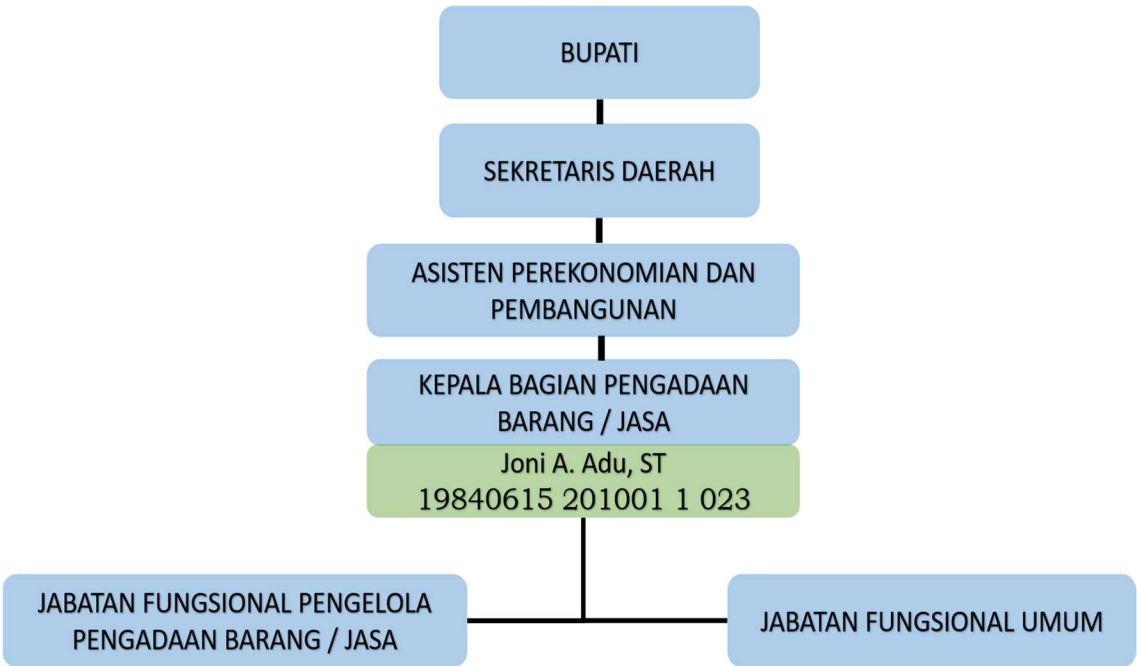
1. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan rencana operasional Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis sumber daya dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai fungsinya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Pada saat ini Jabatan Fungsional di Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) orang.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa



Sumber data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rote Ndao

2.1.2 **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rote Ndao didukung 2 (dua) macam sumber daya yaitu:

a. **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan seluruh individu yang bekerja dalam sebuah organisasi yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi dan pengetahuan mereka untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional yang melaksanakan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Desember 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Bagian Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 12 (dua belas) orang.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Susunan kepegawaian Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

| No                  | Golongan Ruang | Pangkat                  | Jenis Kelamin |   | Jumlah |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|--------|
|                     |                |                          | L             | P |        |
| 1                   | IV/b           | Pembina Tk. I            | -             |   |        |
| 2                   | IV/a           | Pembina                  | 1             |   | 1      |
| Jumlah Golongan IV  |                |                          | 1             |   | 1      |
| 3                   | III/d          | Penata Tk I              | 2             |   | 2      |
| 4                   | III/c          | Penata                   | 1             |   | 1      |
| 5                   | III/b          | Penata Muda Tk I         | 5             | 1 | 6      |
| 6                   | III/a          | Penata Muda              | 1             |   | 1      |
| Jumlah Golongan III |                |                          | 9             | 1 | 10     |
| 7                   | II/d           | Pengatur                 |               |   |        |
|                     | II/c           | Pengatur                 | 1             |   | 1      |
| 8                   | II/b           | Pengatur Muda Tk. I/II B |               |   |        |
| Jumlah Golongan II  |                |                          | 1             | - | 1      |
| TOTAL               |                |                          | 11            | 1 | 12     |

umber Data : PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Rote Ndao sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan keadaan pegawai Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

| No    | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |   | Jumlah |
|-------|--------------------|---------------|---|--------|
|       |                    | L             | P |        |
| 1     | S3                 | -             | - | -      |
| 2     | S2                 | -             | - | -      |
| 3     | S1                 | 8             | 1 | 9      |
| 4     | D III              | 2             | - | 2      |
| 5     | SLTA/SMK           | 1             | - | 1      |
| Total |                    | 11            | 1 | 12     |

Sumber Data : PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 9 (sembilan) orang, DIII berjumlah 2 (dua) orang dan SLTA/SMK berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Jumlah pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa  
Setda Kab. Rote Ndao

| NO | NAMA/NIP                                            | PANGKAT/GOLONGAN          | JABATAN                                         |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Joni A. Adu, ST<br>19840615 201001 1 023            | Pembina (IV.a)            | Kepala Bagian                                   |
| 2  | Richard M. Manafe, ST<br>19830513 200904 1 004      | Penata Tk I (III-d)       | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Muda    |
| 3  | Imanuel F.D.Anin, ST<br>19751209 200312 1 005       | Penata (III-d)            | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Muda    |
| 4  | Moultan D. Saudale, ST<br>19740118 200604 1 009     | Penata (III-c)            | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Muda    |
| 5  | Roberto S.D. Dumannauw, ST<br>19780908 200701 1 019 | Penata Muda Tk I (III-b)  | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Pertama |
| 6  | Yopendas Lido, SH<br>19801101 200604 1 022          | Penata Muda Tk I (III-b)  | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Pertama |
| 7  | Marlon L. Naru, SP<br>19700416 200501 1 014         | Penata Muda Tk. I (III-b) | Penelaah Teknis Kebijakan                       |
| 8  | Herlinda Lenggu, S.ST<br>19820312 200604 2 015      | Penata Muda Tk. I (III-b) | Penelaah Teknis Kebijakan                       |
| 9  | Ronald J. Dethan, A.Md<br>19820131 200904 1 007     | Penata Muda Tk I (III-b)  | Penata Layanan Operasional                      |
| 10 | Jasiel G. Thelik, SE<br>19710613 200604 1 018       | Penata Muda (III-b)       | Penata Layanan Operasional                      |
| 11 | Yaped Y. Sereh<br>19790704 200604 1 013             | Penata Muda (III-a)       | Pengelola Layanan Pengadaan                     |
| 12 | Anderias Bani, A.Md<br>19941129 202203 1 004        | Pengatur (II/c)           | Pengelola Layanan Pengadaan                     |

*Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024*

**a. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Keadaan Sarana Prasarana Kantor pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

| Nama/JenisBarang    | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Ket              |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 1                   | 2               | 3             | 4                        | 5                |
| Komputer PC/Dell    | 2020            | 2             | Baik                     | Total 29.666.800 |
| Komputer PC/Dell    | 2020            | 1             | Baik                     | 29.150.000       |
| Laptop/ Dell        | 2020            | 3             | Baik                     | Total 28.182.000 |
| Printer /Epson      | 2020            | 1             | Baik                     | 4.111.500        |
| Printer/CannonPixma | 2020            | 1             | Rusak                    | 1.042.400        |
| Hardisk Eksternal   | 2020            | 4             | Baik                     | Total 5.140.000  |
| Infocus             | 2020            | 1             | Baik                     | 8.750.000        |
| Kamera DSRL         | 2020            | 1             | Baik                     | 10.687.000       |
| Warles Mic          | 2020            | 1             | Baik                     | 6.500.000        |
| Printer/            | 2020            | 1             | Rusak                    | 2.500.000        |
| Flash Disk          | 2020            | 5             | Baik                     | Total 500.000    |
| Meja Biro           | 2020            | 4             | Baik                     | Total 11.520.000 |
| Lemari Arsip 2Pintu | 2020            | 3             | Baik                     | Total 6.585.000  |
| Kursi Pimpinan/Biro | 2020            | 1             | Baik                     | 2.500.000        |
| Kursi Tamu/Sofa     | 2020            | 1 Set         | Baik                     | 5.750.000        |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian target, realisasi, capaian kinerja, anggaran dan realisasi dari indikator tujuan, sasaran, program kegiatan, sub kegiatan Pagu dan Realisasi Anggaran, Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa dapat di lihat pada table 2.5 dan 2.6 berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024

| INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN                                                                                 | TARGET IKU | TARGET IKK | TARGET RENSTRA TAHUN |        |        |        |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |        |        |        |        | RASIO CAPAIAN TAHUN |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                    |            |            | 2020                 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1                                                                                                                  | 2          | 3          | 4                    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9                       | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                  | 15     | 16     | 17     | 18     |
| Persentase fasilitasi pengadaan Barang/Jasa                                                                        | ✓          |            | 50,00                | 60,00  | 70,00  | 100,00 | 100,00 | 66,39                   | 50,34  | 49,09  | 100,00 |        | 132,78              | 83,90  | 70,13  | 100,00 |        |
| Persentase pengadaan barang/jasa melalui e-procurement                                                             | ✓          |            |                      | 50,34  | 49,09  | 75,00  | 80,00  |                         | 50,34  | 49,09  | 75,19  | 44,04  |                     | 100,00 | 100,00 | 100,25 | 55,05  |
| Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa                                                                        | ✓          |            | 100,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00              | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Persentase Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JF PPBJ)                                        | ✓          |            | 0,00                 | 0,00   | 25,00  | 40,00  | 60,00  | 0,00                    | 0,00   | 25,00  | 38,46  | 38,46  |                     |        | 100,00 | 96,15  | 64,10  |
| Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa                                                                | ✓          |            |                      |        |        |        |        |                         |        |        |        | 36,66  |                     |        |        |        |        |
| Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                                                 | ✓          |            |                      |        |        |        |        |                         |        |        |        | 14,51  |                     |        |        |        |        |
| Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)                                          | ✓          |            |                      |        |        |        |        |                         |        |        |        | 8,82   |                     |        |        |        |        |
| Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)                           | ✓          |            |                      |        |        |        |        |                         |        |        |        | 13,33  |                     |        |        |        |        |
| Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama |            | ✓          |                      |        |        | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |        |        | 100,00 | 100,00 |
| Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                |            | ✓          |                      |        |        | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |        |        | 100,00 | 100,00 |
| Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                               |            | ✓          |                      |        |        | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |        |        | 100,00 | 100,00 |

| INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN                                                                                                                    | TARGET IKU | TARGET IKK | TARGET RENSTRA TAHUN |      |      |        |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |        |        |        |        | RASIO CAPAIAN TAHUN |      |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|--------|--------|
|                                                                                                                                                       |            |            | 2020                 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2020                    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   |
| Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah |            | ✓          |                      |      |      | 100,00 | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |      |      | 100,00 | 100,00 |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Berdasarkan hasil tabel 2.5 pencapaian kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan **Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa** dan indikator kinerja sasaran Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dan Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) selama 5 tahun pelaksanaan yaitu Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang bersifat fluktuatif setiap tahun.

Performance positif Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan pagu indikatif Renstra tahun selanjutnya. Berikut disajikan tabel 2.6 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.6

Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2020 - 2024

| NO | PROGRAM                              | ANGGARAN TAHUN |               |               |             |             | REALISASI ANGGARAN TAHUN |             |               |             |             | RASIO ANGGARAN TAHUN |       |       |        |        |
|----|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------|-------|--------|--------|
|    |                                      | 2020           | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2020                     | 2021        | 2022          | 2023        | 2024        | 2020                 | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
| 1  | 2                                    | 3              | 4             | 5             | 6           | 7           | 8                        | 9           | 10            | 11          | 12          | 13                   | 14    | 15    | 16     | 17     |
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 471.873.600    | 467.168.094   | 264.605.800   | 159.178.000 | 174.828.800 | 452.603.450              | 460.951.250 | 264.325.261   | 159.178.000 | 174.828.800 | 95,92                | 98,67 | 99,89 | 100,00 | 100,00 |
| 2  | Perekonomian dan Pembangunan         | 572.779.600    | 534.716.604   | 796.649.200   | 663.682.000 | 634.500.200 | 510.082.750              | 533.660.600 | 796.265.000   | 663.681.444 | 596.251.645 | 89,05                | 99,80 | 99,95 | 100,00 | 93,97  |
|    | JUMLAH                               | 1.044.653.200  | 1.001.884.698 | 1.061.255.000 | 822.860.000 | 809.329.000 | 962.686.200              | 994.611.850 | 1.060.590.261 | 822.859.444 | 771.080.445 | 92,15                | 99,27 | 99,94 | 100,00 | 95,27  |

Pencapaian kinerja pelaporan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao selama 5 tahun sebelumnya (n-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao, pencapaian kinerja tidak terlepas dari adanya sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai. Dalam rangka mengimplementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati Rote Ndao Tahun 2019-2024. Hasil evaluasi capaian kinerja Bagian PBJ sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bagian PBJ pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan penyedia terkait layanan pengadaan secara elektronik.

#### **2.1.5 Mitra Kerja Sama**

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu:

- a. Pelaku Pengadaan
  - 1) Pengguna Anggaran (PA)
  - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - 4) Pejabat Pengadaan
  - 5) Kelompok Kerja (POKJA)
  - 6) Agen Pengadaan
- b. Penyedia Barang / Jasa
  - 1) Penyedia
- c. Pihak Pendukung dan Pengawas
  - 1) Auditor
  - 2) Regulator / LKPP
  - 3) Masyarakat dan Media
  - 4) Penegak Hukum

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan pelayanan diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat

Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD  | PERMASALAHAN                                            | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                               | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                  |                            |                                                                                    | ISU STRATEGIS                               |                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                                         |                                                               | GLOBAL                                                                         | NASIONAL                   | REGIONAL                                                                           | DAERAH                                      | Bagian Pengadaan Barang / Jasa                         |
| 1                                          | 2                                                       | 3                                                             | 4                                                                              | 5                          | 6                                                                                  | 7                                           | 8                                                      |
| Pelayanan Publik Bidang Sekretariat Daerah | SDM Pengelola Barang dan Jasa Masih Perlu di Tingkatkan | Good Government dan Akses Pelayanan Publik yang belum optimal | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Substainable Development Goals (SDGs)</i> | Transformasi / tata Kelola | Transformasi tata kelola, efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Pemanfaatan sistem pengadaan belum efektif             |
|                                            |                                                         |                                                               |                                                                                |                            |                                                                                    |                                             | Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola PBJ belum optimal |

Sumber Data : PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan pada tabel 2.6, maka isu strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan sistem pengadaan belum efektif
- 2. Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola PBJ belum optimal

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penjelasan Tujuan dan Sasaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

#### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Pernyataan tujuan tersebut menjadi arah bagi Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Dengan demikian, tujuan Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku”**.

#### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dari tujuan yang akan dicapai secara nyata Tahun 2025-2029. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai yaitu **“Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa”**.

Dari penjelasan tersebut maka Bagian Pengadaan Barang / Jasa menjabarkan perumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 pada tabel 3.1 berikut:

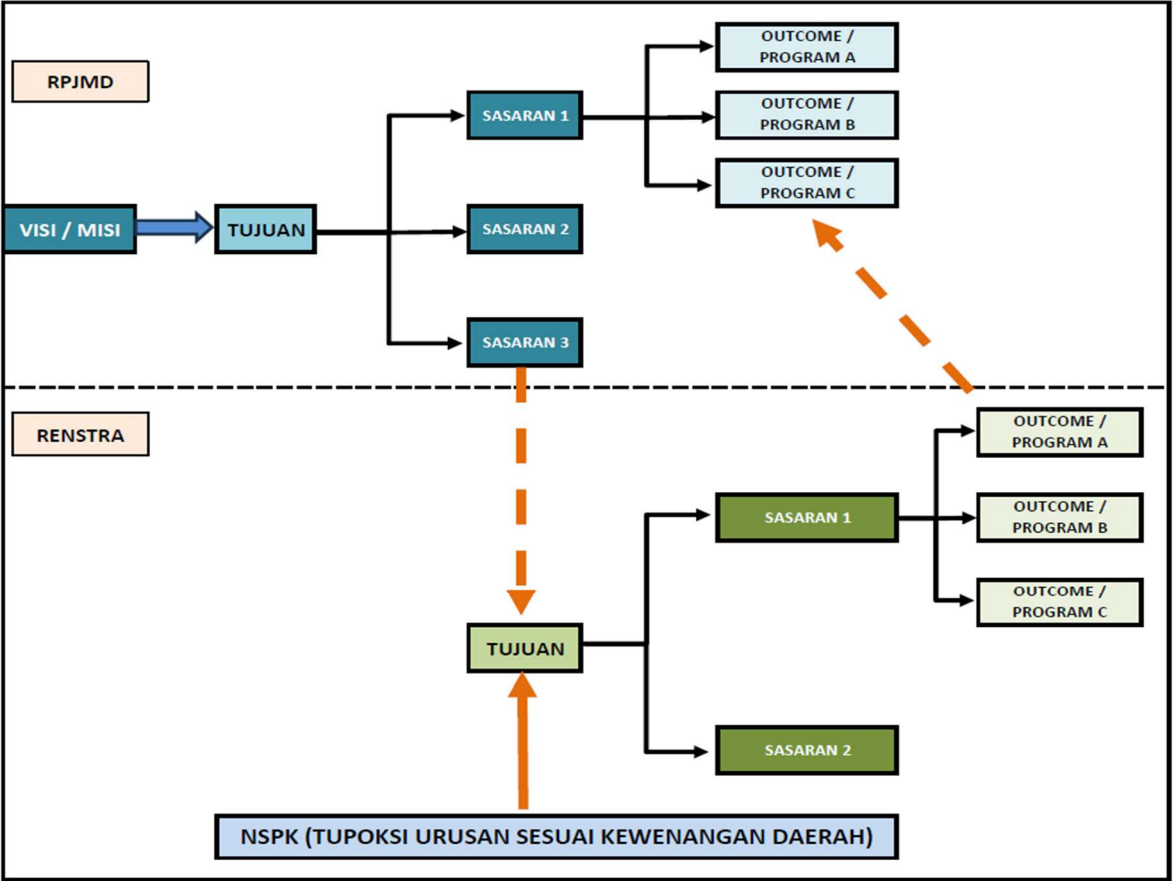
Tabel 3.1  
Perumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029

| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) |         | NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN         | RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                        |                                                          | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                                                               | SATUAN | FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN                                                                                                                                                                               | SPM/IKK/ LAINNYA | KINERJA AWAL | TARGET CAPAIAN |       |       |       |       |       |       | KET |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                                    |         |                                             |                                                                                 |                                                          |                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                               |                  | REALISASI    |                |       |       |       |       |       |       |     |
| TUJUAN                                             | SASARAN |                                             | TUJUAN                                                                          | SASARAN                                                  |                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                               |                  | 2023         | 2024           | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1                                                  | 2       | 3                                           | 4                                                                               | 5                                                        | 6                                                                                        | 7      | 8                                                                                                                                                                                                             | 9                | 10           | 11             | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18  |
|                                                    |         | Meningkatkan Kinerja Urusan Barang dan Jasa | Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku |                                                          | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa                                      | Skor   | Skor ITKP (Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) + Nilai Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)) |                  | 34,55        | 36,66          | 43,21 | 54,46 | 63,77 | 71,58 | 80,39 | 82,76 |     |
|                                                    |         |                                             |                                                                                 | Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                       | Skor   | Skor nilai pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, E-Tendering, Non E-Tendering, E-Katalog, Toko Daring, dan E-Kontrak)                                                                                          |                  | 13,6         | 14,51          | 16,62 | 17,22 | 20,32 | 21,92 | 24,52 | 25,12 |     |
|                                                    |         |                                             |                                                                                 |                                                          | Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)                | Skor   | Jumlah JF PPBJ saat ini / Jumlah Rekomendasi Kemenpan RB x 30                                                                                                                                                 |                  | 8,82         | 8,82           | 8,82  | 10,59 | 12,35 | 14,12 | 15,88 | 17,65 |     |
|                                                    |         |                                             |                                                                                 |                                                          | Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) | Skor   | Capaian Tingkat Kematangan saat ini / total nilai 9 variabel x 40                                                                                                                                             |                  | 12,11        | 13,33          | 17,78 | 26,67 | 31,11 | 35,56 | 40,00 | 40,00 |     |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

Tabel 3.1 menunjukkan keselarasan dan konsistensi tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao memiliki 1 (satu) Indikator kinerja Tujuan dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan formula pengukuran dan memiliki target kinerja Tahun 2025-2030. Kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao dengan Renstra Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2025-2029 seperti gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao



3.3. Strategi

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara sederhana strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai. Strategi menjadi sebuah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Strategi Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029

| TUJUAN                                                                          | SASARAN                                                  | STRATEGI                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku | Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa | Meningkatkan kualitas SDM Pengelola administrasi barang dan jasa |
|                                                                                 |                                                          | Meningkatkan efektivitas layanan pengadaan secara elektronik     |

### 3.4. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan adalah proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu. penahapan pembangunan biasanya dibagi ke dalam tahap-tahap periodisasi yang saling terkait, sehingga tujuan akhir pembangunan bisa dicapai secara bertahap dan berkesinambungan seperti pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2026-2030

| TAHAP I<br>(2026)                                  | TAHAP II<br>(2027)                                 | TAHAP III<br>(2028)                                | TAHAP IV<br>(2029)                                 | TAHAP V<br>(2030)                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                  | 5                                                  |
| Peningkatan kualitas SDM Pengelola barang dan jasa | Peningkatan kualitas SDM Pengelola barang dan jasa | Peningkatan kualitas SDM Pengelola barang dan jasa | Peningkatan kualitas SDM Pengelola barang dan jasa | Peningkatan kualitas SDM Pengelola barang dan jasa |
| Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik    | Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik    | Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik    | Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik    | Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik    |

### 3.5 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan lewat tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong keberhasilan akan ditentukan oleh arah kebijakan yang dilaksanakan periode 2025-2029 pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

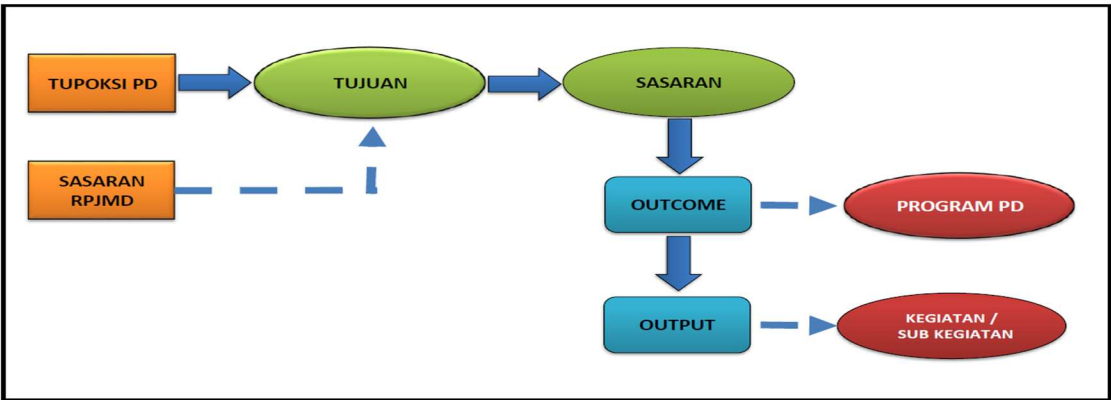
| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK                          | ARAH<br>KEBIJAKAN<br>RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAGIAN<br>PENGADAAN BARANG/JASA                                                  | KET |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Menyelenggarakan urusan pengadaan barang dan jasa |                            | Peningkatan kompetensi SDM pengelola barang dan jasa melalui peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis |     |
|    |                                                   |                            | Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik secara transparansi dan akuntabilitas                   |     |

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**  
**URUSAN**

**4.1. Cascading Kinerja Tahun 2025-2029**

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, maka gambaran cascading kinerja Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator seperti pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Bagian Pengadaan  
Barang / Jasa Setda Kab. Rote Ndao



Gambar 4.1 menunjukkan alur perencanaan dan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penjelasan alur perencanaan sebagai berikut:

1. Sasaran RPJMD menjadi referensi dalam penyusunan **Tujuan** dan **Sasaran** perangkat daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah merupakan dasar atau acuan utama dalam merumuskan **Tujuan** Perangkat Daerah;
3. Tujuan dirumuskan berdasarkan tupoksi perangkat daerah dan sasaran RPJMD dan menggambarkan apa yang ingin dicapai secara umum oleh perangkat daerah.
4. Sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, disinilah mulai diarahkan pencapaian kinerja secara lebih terukur.
5. Outcome merupakan dampak dan manfaat dari sasaran yang ingin dicapai.
6. Ouput merupakan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan biasanya berupa barang dan jasa.
7. Program dirumuskan berdasarkan outcome yang ingin dicapai.
8. Kegiatan dan sub Kegiatan merupakan aktivitas teknis untuk menghasilkan output yang akhirnya mendukung pencapaian outcome.

Dari pernyataan tersebut, maka Cascading Kinerja Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Cascading Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                           | OUTPUT                                                                              | INDIKATOR                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                   | 2      | 3       | 4                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                                               | 7                                                                | 8   |
|                                     |        |         | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                     | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     |     |
|                                     |        |         |                                                   |                                                                                     | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah                                           |                                                                  |     |
|                                     |        |         |                                                   |                                                                                     | Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu                                        |                                                                  |     |
|                                     |        |         |                                                   |                                                                                     | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                               |                                                                  |     |
|                                     |        |         |                                                   | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu     | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  |     |
|                                     |        |         |                                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                  |     |
|                                     |        |         |                                                   | Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |     |
|                                     |        |         |                                                   | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |     |
|                                     |        |         |                                                   | Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                                           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |     |
|                                     |        |         |                                                   | Meningkatnya Administrasi BMD Perangkat Daerah                                      | Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                                                                          | SASARAN                          | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                | KET |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                              |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Meningkatnya Layanan Umum Perangkat Daerah                                                                       | Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan                                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Tersediannya Bahan Logistik Kantor                                                                               | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Terpeliharannya Barang Milik Daerah                                                                              | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara                                                             | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                         |     |
|                                     | Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku |                                  |         |                                                                                                                  | <b>Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa</b>                                             |                                                                                                                  |     |
|                                     |                                                                                 | Terwujudnya administrasi layanan |         |                                                                                                                  | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                                     |                                                                                                                  |     |
|                                     |                                                                                 |                                  |         |                                                                                                                  | Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)                              |                                                                                                                  |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                 | OUTCOME                                                                 | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | KET |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|                                     |        | Pengadaan Barang / Jasa |                                                                         |        | Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) |                                              |     |
|                                     |        |                         | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perkonomian dan pembangunan |        | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                       | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN         |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)                |                                              |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) |                                              |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Persentase pengadaan barang/jasa melalui e-procurement                                   | Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa            |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa                               | Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa            |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik                                 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik          |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan edvokasi pengadaan barang dan jasa             | Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |     |
|                                     |        |                         |                                                                         |        |                                                                                          |                                              |     |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

#### **4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2029 dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                                          | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                                                                | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 |             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|
|                                                         |                                                          |                                                                                                                 |        |                        |             | TAHUN 2025                            |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |             | TAHUN 2030 |             |                                     |        |
|                                                         |                                                          |                                                                                                                 |        | T                      | Rp          | T                                     | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          |                                     |        |
| 1                                                       |                                                          | 2                                                                                                               | 3      | 4                      | 5           | 6                                     | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16         | 17          | 18                                  | 19     |
|                                                         | NON URUSAN                                               |                                                                                                                 |        |                        |             |                                       |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                                     |        |
| I                                                       | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | %      | 100                    | 174.828.800 | 100                                   | 123.106.550 | 100        | 123.000.000 | 100        | 147.653.915 | 100        | 167.965.262 | 100        | 194.080.800 | 100        | 254.080.800 |                                     | Kab.RN |
|                                                         |                                                          | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah                                           | %      | 100                    |             | 100                                   |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             |            |             |                                     |        |
|                                                         |                                                          | Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu                                        | %      | 100                    |             | 100                                   |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             |            |             |                                     |        |
|                                                         |                                                          |                                                                                                                 |        |                        |             |                                       |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                                     |        |
|                                                         |                                                          | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                                                               | %      | 100                    |             | 100                                   |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             | 100        |             |            |             |                                     |        |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                                                           | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                                                                                            | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN 2024 |            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
|                                                         |                                                                           |                                                                                                                                             |         |                        |            | TAHUN 2025                            |            | TAHUN 2026 |            | TAHUN 2027 |            | TAHUN 2028 |            | TAHUN 2029 |            | TAHUN 2030 |            |                                     |         |
|                                                         |                                                                           |                                                                                                                                             |         | T                      | Rp         | T                                     | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         |                                     |         |
| 1                                                       | Perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah  | Persentase<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggara<br>n dan evaluasi<br>kinerja<br>perangkat<br>daerah yang<br>disampaikan<br>tepat waktu | %       | 100                    | -          | 100                                   | 3.286.000  | 100        | 4.219.450  | 100        | 6.293.100  | 100        | 6.293.100  | 100        | 10.000.000 | 19         | 10.000.000 | Bag PBJ                             | Kab. RN |
| 1                                                       | Penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>perangkat daerah                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                     | Dok     | 12                     |            | 12                                    |            | 12         | 2.000.000  | 12         | 3.146.550  | 12         | 3.146.550  | 12         | 5.000.000  | 12         | 5.000.000  |                                     | Kab. RN |
| 2                                                       | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                   | Laporan | 7                      |            | 7                                     | 3.286.000  | 7          | 2.219.450  | 7          | 3.146.550  | 7          | 3.146.550  | 7          | 5.000.000  | 7          | 5.000.000  |                                     | Kab. RN |
| 2                                                       | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>keuangan<br>Perangkat<br>Daerah tepat<br>waktu                                                  | %       | 100                    | 40.460.000 | 100                                   | 43.380.000 | 100        | 43.380.000 | 100        | 40.000.000 | 100        | 45.000.000 | 100        | 45.000.000 | 100        | 45.000.000 |                                     | Kab. RN |
| 3                                                       | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian /<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD                                                     | Dok     | 12                     | 40.460.000 | 12                                    | 43.380.000 | 12         | 43.380.000 | 12         | 40.000.000 | 12         | 45.000.000 | 12         | 45.000.000 | 12         | 45.000.000 |                                     | Kab. RN |
| 3                                                       | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>BMD                                                                                             | %       | 100                    | 4.200.000  | 100                                   | 4.200.000  | 100        | 4.200.000  | 100        | 4.200.000  | 100        | 4.200.000  | 100        | 4.200.000  | 100        | 4.200.000  |                                     | Kab. RN |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                                      | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                     | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN 2024 |             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                         |                                                      |                                                                      |         |                        |             | TAHUN 2025                            |            | TAHUN 2026 |            | TAHUN 2027 |            | TAHUN 2028 |            | TAHUN 2029 |            | TAHUN 2030 |             |                                     |                                  |
|                                                         |                                                      |                                                                      |         | T                      | Rp          | T                                     | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp          |                                     |                                  |
|                                                         |                                                      | Perangkat Daerah tepat waktu                                         |         |                        |             |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                                     |                                  |
| 4                                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                   | Dok     | 12                     | 4.200.000   | 12                                    | 4.200.000  | 12         | 4.200.000  | 12         | 4.200.000  | 12         | 4.200.000  | 12         | 4.200.000  | 12         | 4.200.000   |                                     | Kab. RN                          |
| 4                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah                   | %       | 100                    | 102.876.300 | 100                                   | 50.758.550 | 100        | 50.758.550 | 100        | 73.464.815 | 100        | 77.472.162 | 100        | 99.880.800 | 100        | 154.880.800 |                                     | Kab. RN                          |
| 5                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan       | Paket   |                        |             |                                       |            |            |            | 1          | 20.000.000 | 1          | 5.000.000  | 1          | 10.000.000 | 1          | 30.000.000  |                                     | Kab. RN                          |
| 6                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                   | Paket   | 2                      | 22.876.000  | 2                                     | 11.832.000 | 1          | 11.832.000 | 1          | 11.832.000 | 1          | 20.000.000 | 1          | 20.170.638 | 1          | 20.170.638  |                                     | Kab. RN                          |
| 7                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan          | Paket   | 2                      | 9.150.300   | 2                                     | 5.709.550  | 2          | 5.709.550  | 2          | 5.709.550  | 2          | 5.710.162  | 2          | 5.710.162  | 2          | 5.710.162   |                                     | Kab. RN                          |
| 8                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 20                     | 70.850.000  | 10                                    | 33.217.000 | 5          | 33.217.000 | 5          | 35.923.265 | 5          | 46.762.000 | 5          | 64.000.000 | 5          | 99.000.000  |                                     | Kab. RN, Prov.NTT, Luar Prov.NTT |
| 5                                                       | Penyediaan Jasa penunjang Urusan                     | Tersedianya Jasa                                                     | Laporam | 1                      | 780.000     | 1                                     | 1.040.000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                                     |                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                                                                                                  | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                                                       | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN 2024 |            | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
|                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                        |         |                        |            | TAHUN 2025                            |            | TAHUN 2026 |            | TAHUN 2027 |            | TAHUN 2028 |            | TAHUN 2029 |            | TAHUN 2030 |            |                                     |         |
|                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                        |         | T                      | Rp         | T                                     | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         | T          | Rp         |                                     |         |
|                                                         | Pemerintahan Daerah                                                                                              | penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                          |         |                        |            |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                     |         |
|                                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | Laporam | 1                      | 780.000    | 1                                     | 1.040.000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                     |         |
| 6                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara                                                            | Unit    | 2                      | 26.512.500 | 4                                     | 20.442.000 | 5          | 20.442.000 | 7          | 23.696.000 | 7          | 35.000.000 | 7          | 35.000.000 | 7          | 40.000.000 |                                     | Kab. RN |
| 9                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 2                      | 26.512.500 | 2                                     | 16.942.000 | 2          | 16.942.000 | 2          | 16.696.000 | 2          | 20.000.000 | 2          | 20.000.000 | 2          | 25.000.000 |                                     | Kab. RN |
| 10                                                      | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang Dipelihara                                                     | Unit    |                        |            | 2                                     | 3.500.000  | 3          | 3.500.000  | 4          | 7.000.000  | 5          | 15.000.000 | 5          | 15.000.000 | 5          | 15.000.000 |                                     | Kab. RN |
|                                                         |                                                                                                                  | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa                                                    | Skor    | 36,66                  |            | 43,21                                 |            | 54,46      |            | 63,77      |            | 71,58      |            | 80,39      |            | 82,76      |            |                                     |         |
|                                                         |                                                                                                                  | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                                     | Skor    | 14,51                  |            | 16,62                                 |            | 17,22      |            | 20,32      |            | 21,92      |            | 24,52      |            | 25,12      |            |                                     |         |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                               | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                                                              | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 |             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |            |             |            |             |            |             |            |             | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI      |            |    |  |       |  |       |  |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|
|                                                         |                                               |                                                                                                               |        |                        |             | TAHUN 2025                            |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |             |                                     |             | TAHUN 2030 |    |  |       |  |       |  |       |
|                                                         |                                               |                                                                                                               |        | T                      | Rp          | T                                     | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          |                                     |             | T          | Rp |  |       |  |       |  |       |
|                                                         |                                               | Nilai Jumlah<br>Jabatan<br>Fungsional<br>Pengelola<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>(JF PPBJ)                   | Skor   | 8,82                   |             | 8,82                                  |             | 10,59      |             | 12,35      |             | 14,12      |             | 15,88      |             | 17,65                               |             |            |    |  |       |  |       |  |       |
|                                                         |                                               | Nilai Tingkat<br>Kematangan<br>Unit Kerja<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>Pemerintah<br>(UKPBJ) | Skor   | 13,33                  |             | 17,78                                 |             | 26,67      |             | 31,11      |             | 35,56      |             | 40,00      |             | 40,00                               |             |            |    |  |       |  |       |  |       |
|                                                         | PENGADAAN<br>BARANG DAN<br>JASA               |                                                                                                               |        |                        |             |                                       |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                                     |             |            |    |  |       |  |       |  |       |
| II                                                      | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN<br>DAN<br>PEMBANGUNAN | Nilai Pemanfaatan<br>Sistem<br>Pengadaan                                                                      | Skor   | 14,51                  | 596.500.145 | 16,62                                 | 645.910.200 | 17,22      | 647.000.000 | 20,32      | 632.346.085 | 21,92      | 642.034.738 | 24,52      | 645.919.200 | 25,12                               | 645.919.200 |            |    |  |       |  |       |  |       |
|                                                         |                                               | Nilai Jumlah<br>Jabatan<br>Fungsional<br>Pengelola<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>(JF PPBJ)                   | Skor   | 8,82                   |             |                                       |             | 8,82       |             |            |             | 10,59      |             |            |             | 12,35                               |             |            |    |  | 14,12 |  | 15,88 |  | 17,65 |
|                                                         |                                               | Nilai Tingkat<br>Kematangan<br>Unit Kerja<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>Pemerintah<br>(UKPBJ) | Skor   | 13,33                  |             |                                       |             | 17,78      |             |            |             | 26,67      |             |            |             | 31,11                               |             |            |    |  | 35,56 |  | 40,00 |  | 40,00 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>/ SUB KEGIATAN |                                                       | INDIKATOR<br>OUTPUT /<br>OUTCOME                                                            | SATUAN  | BASELINE<br>TAHUN 2024 |             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | UNIT/ BIDANG<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | LOKASI                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                       |                                                                                             |         |                        |             | TAHUN 2025                            |             | TAHUN 2026 |             | TAHUN 2027 |             | TAHUN 2028 |             | TAHUN 2029 |             | TAHUN 2030 |             |                                     |                                           |
|                                                         |                                                       |                                                                                             |         | T                      | Rp          | T                                     | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          | T          | Rp          |                                     |                                           |
| 8                                                       | Pengelolaan<br>pengadaan<br>Barang/Jasa               | Persentase<br>pengadaan<br>barang/jasa<br>melalui e-<br>procurement                         | %       | 62                     | 596.500.145 | 48                                    | 645.910.200 | 14         | 647.000.000 | 14         | 632.346.085 | 15         | 642.034.738 | 15         | 645.919.200 | 15         | 645.919.200 | Bidang<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa  |                                           |
| 16                                                      | Pengelolaan<br>pengadaan<br>Barang/Jasa               | Jumlah<br>dokumen hasil<br>pengelolaan<br>pengadaan<br>barang dan jasa                      | Dokumen | 4                      | 328.391.000 | 4                                     | 433.298.000 | 4          | 419.400.000 | 4          | 404.746.085 | 4          | 414.434.738 | 4          | 418.319.200 | 4          | 418.319.200 |                                     | Kab. RN                                   |
| 17                                                      | Layanan Pengadaan<br>Secara Elektronik                | Jumlah<br>dokumen hasil<br>layanan<br>pengadaan<br>secara<br>elektronik                     | Dokumen | 4                      | 257.109.145 | 4                                     | 202.318.200 | 4          | 202.318.200 | 4          | 202.318.200 | 4          | 202.318.200 | 4          | 202.318.200 | 4          | 202.318.200 |                                     | Kab. RN                                   |
| 18                                                      | Pembinaan<br>Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | Jumlah orang<br>yang mengikuti<br>pembinaan dan<br>edvokasi<br>pengadaan<br>barang dan jasa | orang   | 54                     | 11.000.000  | 40                                    | 10.294.000  | 6          | 25.281.800  | 6          | 25.281.800  | 7          | 25.281.800  | 7          | 25.281.800  | 7          | 25.281.800  |                                     | Kab. RN,<br>Prov.NTT,<br>Luar<br>Prov.NTT |
|                                                         |                                                       |                                                                                             | %       | 100                    | 174.828.800 | 100                                   | 769.016.750 | 100        | 770.000.000 |            | 780.000.000 |            | 810.000.000 |            | 840.000.000 |            | 900.000.000 |                                     |                                           |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dianalogikan sebagai “Mbule Sio”. Secara harafiah “MBULE SIO” merupakan 9 Bulir Agenda/Tekad untuk membawa Transformasi bagi masyarakat Rote Ndao secara bersama- sama dalam 5 tahun ke depan. Bagian Pengadaan Barang / Jasa dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan “MBULE ESA” diartikan sebagai ROTE NDAO AMANAH, yaitu dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan dilaksanakan secara bersih, efektif, transparan, profesional dan anti korupsi sehingga mampu mengadminstrasikan keadilan sosial di Kabupaten Rote Ndao seperti pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM PERANGKAT DAERAH | OUTCOME                                                                 | KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | KET |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                            | 3                                                                       | 4                                            | 5   |
|    |                                              |                                                                         |                                              |     |
|    | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN         | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perkonomian dan pembangunan |                                              |     |
|    |                                              |                                                                         | Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa            |     |
|    |                                              |                                                                         | Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa            |     |
|    |                                              |                                                                         | Layanan Pengadaan Secara Elektronik          |     |
|    |                                              |                                                                         | Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |     |
|    |                                              |                                                                         |                                              |     |

Sumber Data: PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 37able37t pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai 37able37t kinerja.

Penetapan 37able37tor kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi 37able37to tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bagian Pengadaan

Barang / Jasa. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah satu tabel untuk meningkatkan kinerja Bagian Pengadaan Barang / Jasa, telah indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao

| NO | INDIKATOR                                                                                | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                                                          |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | 2                                                                                        | 3      | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
| 1  | Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa                                      | Skor   | 43,21        | 54,46 | 63,77 | 71,58 | 80,39 | 82,76 |     |
| 2  | Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan                                                       | Skor   | 16,62        | 17,22 | 20,32 | 21,92 | 24,52 | 25,12 |     |
| 3  | Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)                | Skor   | 8,82         | 10,59 | 12,35 | 14,12 | 15,88 | 17,65 |     |
| 4  | Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) | Skor   | 17,78        | 26,67 | 31,11 | 35,56 | 40,00 | 40,00 |     |

Sumber Data : PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao memiliki 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja periode Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penetapan target setiap tahunnya menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya

#### 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam renstra adalah proses perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan secara sistematis dan strategis dalam dokumen perencanaan lima tahunan oleh perangkat daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao

| NO | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                                                                                                                       |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3      | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10  |
|    | Pengadaan                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |       |     |
| 1  | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                    | %      |              |       |       |       |       |       |     |
| 2  | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                   | %      | 71,43        | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |     |
| 3  | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                  | %      | 10,04        | 10,19 | 12,64 | 13,66 | 14,91 | 16,15 |     |
| 4  | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | %      | 16,42        | 35,44 | 6,42  | 18,74 | 15,19 | 1,55  |     |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao;
2. Konsistensi dan Keterhubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, indikator dan target kinerja RPJMD dengan Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029;
3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029;
5. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, 26 September 2025

Kepala Bagian Pengadaan  
Barang/JasaSetda Kabupaten Rote Ndao,

The image shows a circular official stamp of the Rote Ndao District Secretariat (Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Sekretariat Daerah). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Jon A. Adu, ST

Pembina

NIP. 19840615 201001 1 023